

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, sistem Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (PBJP) di Indonesia berlandaskan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Setiap peraturan dan sistem yang dijalankan antar negara pastinya ada kesamaan, seperti persamaan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan memiliki kesamaan yang sama, yaitu memajukan dan meningkatkan peran para Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan berharap adanya peran Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat membantu pertumbuhan perekonomian dalam industri lokal. Malaysia merupakan negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia, atas kedekatan letak geografisnya tidak heran jika sistem pengadaan kedua negara ini mempunyai kesamaan yang cukup banyak, seperti dalam hal prinsip pengadaan yang dan jenis pengadaan yang digunakan.

Penulis juga meninjau perbandingan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan terdapat pada metode pengadaannya. Metode pengadaan pada

Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia terlalu banyak dibandingkan negara lain, dimana metode pengadaan di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) penyelenggara yaitu Penyedia dan Swakelola.

Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia salah satunya pelaksanaan sistem pengadaan elektronik atau *e-procurement*. *Sistem ini diharapkan dapat* mencerminkan keterbukaan atau transparansi sehingga praktik kecurangan di Indonesia dapat berkurang. Tidak hanya itu, sistem ini dapat menghemat anggaran pemerintah dan mempermudah serta mempercepat proses pengadaan. Selain itu, perlunya pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh instansi pemerintah guna mewujudkan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa. Pengawasan ini tidak hanya impinan instansi pemerintah terkait, pengguna barang dan jasa, dan unit pengendalian internal, akan tetapi peran masyarakat juga diperlukan.

Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Malaysia mengacu pada praktik tata kelola yang baik dengan mengikuti aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia. Oleh karena itu, Malaysia mengesahkan Undang-Undang pengadaan baru pada tahun 2019 disebabkan pada tahun 2018 pengadaan publik di Malaysia seringkali tidak transparan. Pemerintah Malaysia sangat megutamakan transparansi agar pengadaan di Malaysia mempunyai tata kelola dan praktik yang terbaik.

Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Inggris dengan enerapkan semua ketentuan *non-mandatory directive* untuk memberikan fleksibilitas kepada otoritas kontrak. Inggris menjadi pengguna prosedur terbesar

bagi dialog kompetitif karena Inggris negara pertama yang memperkenalkan prosedur tersebut dengan harapan bisa menjadi pengganti prosedur yang dinegosiasikan. Inggris dengan negara tetangganya, yaitu Jerman dan Swedia mempunyai perbedaan implementasi dalam pelaksanaan mensejahterahkan Usaha Kecil Menengah (UKM), Pemerintah Inggris masih kurang berhasil, sebaiknya Pemerintah Inggris mengadakan pelatihan bagi tender seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Jerman. Penerapan aturan pengadaan publik di Jerman dan Swedia lebih luas dan taat kepada aturan, berbanding terbalik dengan Pemerintah Inggris tidak mempunyai aturan dan standar yang berlaku.

Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Amerika Serikat dengan menjadi pihak dalam Perjanjian Pengadaan Pemerintah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Pengadaan Pemerintah (GPA) bertujuan untuk saling membuka pasar pengadaan barang, jasa, dan jasa konstruksi pemerintah di antara para pihak. Dalam perjanjian, pihak luar harus mengikuti aturan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Para pihak dalam perjanjian harus memperlakukan barang, jasa, dan pemasok pihak lain (luar Amerika Serikat) tidak kurang baik daripada barang-barang dari sumber dalam negeri atau pihak lain dan tidak boleh mendiskriminasi pemasok lokal berdasarkan afiliasi atau kepemilikan asing. Pengadaan di Amerika Serikat tidak mempunyai rentang waktu khusus dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, agen pengadaan menggunakan proses pemesanan yang paling sederhana secara adil.

Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Afrika Selatan dengan mengurangi tantangan besar pada praktik pengadaan yang menyebabkan

adanya pengeluaran tidak teratur dan ketidakteraturan material. Pengeluaran tidak teratur adalah semua pengeluaran di mana ada ketidakpatuhan prosedural dengan undang-undang sebelum pembayaran dan ketidakteraturan material berasal dari ketidakpatuhan legislatif dan prosedural, akan tetapi memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat mencakup kasus penipuan, pencurian, dan pelanggaran kewajiban fidusia. Tantangan dalam pengadaan publik di Afrika Selatan, yaitu: anggaran berlebih maupun kurang; manajemen kontrak; kurangnya kapasitas, keterampilan, dan pengetahuan; perencanaan yang tidak memadai sesuai dengan permintaan dan anggaran; ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan peraturan; dan desentralisasi sistem pengadaan tingkat tinggi.